

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya Buku Profil Kelitbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 bisa disusun dengan baik.

Buku Profil Kelitbangan ini merupakan inventarisasi hasil kelitbangan yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu Tahun 2017-2018. Hasil kelitbangan dimaksud meliputi daftar hasil kajian, penelitian, dan pengembangan serta inovasi daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, instansi pusat/ UPT kementerian, instansi/lembaga peneliti, maupun peneliti secara individu yang dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan adanya buku Profil Kelitbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman, serta *input* dalam penyusunan kebijakan daerah, utamanya untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, baik dalam konteks makro, maupun mikro (teknis operasional). Selanjutnya, tim penyusun sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang ikut berperan aktif dalam penyusunan buku ini, terutama kepada peneliti yang bersedia memberikan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Kami menyadari bahwa apa yang disajikan dalam Buku Profil Kelitbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 ini masih membutuhkan penyempurnaan, sehingga masukan dan saran sangat kami butuhkan. Demikian Buku Profil Kelitbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 ini disusun agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak, Desember 2018

**Pt. KEPALA BAPELITBANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si.**  
**NIP. 19640404 198603 1 017**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b> .....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>BAB II</b> .....	4
GAMBARAN UMUM DAERAH .....	4
<b>BAB III</b> .....	8
DAFTAR KAJIAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 – 2018 .....	8
<b>BAB IV</b> .....	45
PENUTUP .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Paradigma desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menyikapi perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta perkembangan isu strategis daerah, nasional, regional, maupun global, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi krusial bagi pemerintah daerah. Eksistensi litbang sangat dibutuhkan pada tahap formulasi kebijakan berupa kajian ilmiah dan rekomendasi sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dasar pelaksanaan kegiatan kelitbangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, namun hal ini belum diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang ada hanyalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Rekayasa Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, sementara Peraturan Pemerintah untuk Kegiatan Kelitbangan di Pemerintah Daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan selanjutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal di atas, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat dan faktual agar perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah menjadi lebih terarah, efisien, optimal, serta tepat sasaran. Oleh karena itu, sudah saatnya institusi litbang yang ada di daerah memberikan kontribusi maksimal sebagai sumber penyedia berbagai rekomendasi kebijakan atas dasar *research policy* yang akan ditetapkan oleh penyelenggara pemerintahan. Dari berbagai institusi inilah diharapkan dapat lahir regulasi dan kebijakan yang secara cepat dan tepat mampu mengakomodir kepentingan serta aspirasi masyarakat. Urgensi penguatan kelembagaan litbang daerah menjadi sebuah keniscayaan apabila pemerintah daerah ingin melakukan percepatan dan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan saat ini sangat dipengaruhi oleh ketetapan kita dalam merumuskan regulasi/kebijakan publik (*public policy*), baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terdapat 4 (empat) faktor utama yang mendorong pergeseran dalam proses pengambilan keputusan tersebut, yaitu: 1. Perubahan teknologi terutama pengembangan dan penyebaran informasi serta teknologi komunikasi yang menghilangkan jarak dan waktu, sehingga apa yang kita lakukan di suatu tempat dapat menyebar secara massif ke berbagai tempat lainnya pada durasi waktu yang sama; 2. Globalisasi yang secara sengaja diintegrasikan ke dalam sistem perekonomian global, sehingga perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah memiliki ketergantungan kepada perekonomian global; 3. Terjadinya pergeseran peran negara dalam pembangunan inklusif, dimana deregulasi dan privatisasi harus dilakukan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien agar tidak terjadi distorsi pasar, sehingga hal ini menuntut peran aparat sipil negara (ASN) yang profesional, dan memiliki pola pikir sistem agar mendapatkan berbagai terobosan yang luar biasa; dan 4. Tuntutan masyarakat agar melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, lebih transparan, akuntabel, berkinerja tinggi, dan bermanfaat bagi publik.

Memperhatikan hal-hal tersebut, perencanaan berbasis penelitian ( *research-based planning* ) dan inovasi dalam pelaksanaannya sangatlah penting. Artinya, setiap perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berdasarkan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi, sehingga pengambilan keputusan strategis oleh para pimpinan daerah dilakukan secara tepat dan bermanfaat serta bermakna bagi kepentingan publik. Dalam konteks inilah, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan beban fungsi penunjang masing-masing dan dikelola

secara profesional. Selanjutnya, untuk mengakselerasi agenda penelitian, pengembangan, dan inovasi, agar dilakukan kolaborasi dengan konsep “Litbang Berbagi”, sehingga terjadi kesatuan langkah yang saling mendukung dan mengintegrasikan agenda kelitbangan Pusat-Daerah untuk menganalisis berbagai issue yang berkembang dan memerlukan solusi pada kesempatan pertama.

## **I.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Penyusunan Buku Profil Kelitbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 bertujuan untuk menginventarisir hasil kelitbangan yang dilaksanakan dalam lingkup wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu Tahun 2017 dan 2018.

Sasaran penyusunan Buku Profil Kelitbangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.

## **I.3 LANDASAN HUKUM**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 206);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
- h. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71);

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH

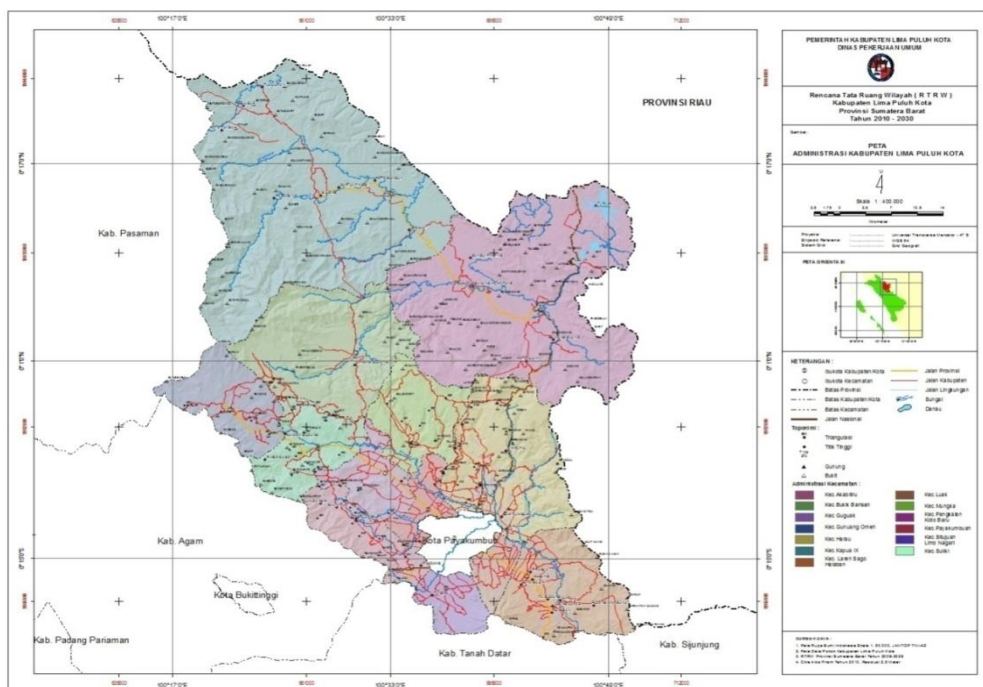
#### II.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dan juga sebagai gerbang utama dijalur darat dengan Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71" LU - 0°22'14,52" LS dan 100°15'44,10" BT - 100°50'47,80" BT dengan luas wilayah 3.354,30 km<sup>2</sup> atau seluas 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 km<sup>2</sup>. Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau.

Berikut disajikan Peta administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Gambar 2.1 di bawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2030

Posisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik di sektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah terutama untuk wisata lembah Harau yang lokasinya dekat dengan jalur lalulintas Sumbar-Riau maupun dari sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan dan peternakan bahkan sampai sektor perikanan yang akan menjadi *supplier* bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat dan Provinsi tetangga seperti Riau, Jambi dan Bengkulu. Dengan luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 60.000 ha dan akses yang tidak sulit untuk dijangkau, maka akan sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi.

Kabupaten Lima Puluh kota terdiri dari 13 Kecamatan, 79 Nagari, dan 410 Jorong. Kecamatan yang paling luas di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kecamatan Kapur IX yaitu seluas 723,36 Km<sup>2</sup> atau 21,57% dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Luak (61,68 Km<sup>2</sup> atau 1,84% dari luas Kabupaten). Luas wilayah per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.1**  
**Luas Wilayah Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Payakumbuh	99,47	2,97
2	Akabiluru	94,26	2,81
3	Luak	61,68	1,84
4	Lareh Sago Halaban	394,85	11,77
5	Situjuah Limo Nagari	74,18	2,21
6	Harau	416,80	12,43
7	Guguak	106,20	3,17
8	Mungka	83,76	2,50
9	Suliki	136,94	4,08
10	Bukik Barisan	294,20	8,77
11	Gunung Omeh	156,54	4,67
12	Kapur IX	723,36	21,57
13	Pangkalan Koto Baru	712,06	21,23
<b>Jumlah</b>		<b>3354,30</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2017*

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter sampai 2.261 meter. Lebih dari setengah wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang bergunung (dengan kelerengan lebih dari 40%) yaitu sekitar 56,3% dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan kelerengan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan



budidaya yaitu kemiringan dibawah 40% adalah sekitar 46,7% dari luas wilayah kabupaten. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dilalui oleh dua sistem aliran sungai, yaitu DAS Kampar Kanan di bagian utara dan DAS Kuantan di bagian selatan dimana Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hulu dari beberapa sungai yang mengalir menuju daerah Provinsi Riau dan Jambi. Kedua DAS tersebut merupakan DAS Prioritas I yang perlu segera direhabilitasi karena banyak memiliki lahan kritis.

## **II.2. KELEMBAGAAN LITBANG**

Lembaga litbang di Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tugas dan fungsi litbang berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam Pasal 2 Ayat (3) disebutkan: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam Perbup tersebut disebutkan bahwa fungsi kelitbangan dijalankan pada bidang Data, evaluasi, penelitian dan pengembangan dengan uraian tugas dan fungsi kepala sebidang penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program terkait penyelenggaraan kegiatan pengembangan data/informasi, evaluasi, pelaporan dan kerjasama pembangunan, serta penelitian dan pengembangan di daerah;
2. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
3. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan kelitbangan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
7. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;

8. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
9. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
10. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
11. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; dan
12. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **II.3. SUMBER DAYA KELITBANGAN**

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dikepalai oleh Kepala Badan. Sekretariat terdiri dari 3 subag, yaitu subag Program dan Perencanaan, subag Keuangan dan subag Umum dan Kepegawaian.

Empat bidang pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Infrastruktur, Perencanaan Wilayah dan Lingkungan Hidup serta Bidang Data, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan. Masing-masing bidang diisi oleh 3 sub-bidang. Bidang Data Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 3 (tiga) sub-bidang yaitu; sub-bidang evaluasi dan kerja sama, sub-bidang data dan informasi, serta sub-bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan struktur organisasi yang ada, untuk penelitian dan pengembangan hanya berupa satu sub-bidang (eselon IV). Hal ini cukup menyulitkan pergerakan dari kegiatan kelitbangan karena hanya berupa satu sub-bidang.

Sumber daya kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini hanya terdiri dari satu kepala bidang, satu kepala sub-bidang dan satu fungsional umum kelitbangan. Untuk fungsional peneliti, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki fungsional peneliti. Hal ini semakin membuat kegiatan kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota kurang bergairah, oleh sebab itu ke depannya perlu penguatan kelembagaan kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penguatan ini baik dari segi pendanaan, struktur organisasi maupun penguatan personil melalui pengadaan jabatan fungsional peneliti untuk Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **BAB III**

#### **DAFTAR KAJIAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017-2018**

Tahun 2018 ini terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sub-bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain adalah kegiatan koordinasi kelitbangan, sosialisasi kegiatan kelitbangan, kegiatan merangkum/ mengumpulkan daftar kajian, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta melakukan kegiatan Focuss Group Discussion (FGD) yang bekerja sama dengan Universitas Andalas Padang.

Kegiatan perangkuman/ pengumpulan daftar kajian, penelitian, pengembangan dan inovasi yang dilakukan melibatkan seluruh stakeholder litbang yang ada, baik unsur dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lima Puluh Kota, Instansi Pusat seperti Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, masyarakat maupun dari Perguruan Tinggi yang ada seperti Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Politeknik Pertanian Payakumbuh dan lembaga perguruan tinggi lainnya.

Daftar kajian, penelitian, pengembangan dan inovasi yang dirangkum/ dikumpulkan ini dikelompokkan berdasarkan bidang yang ada pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Bidang – bidang tersebut adalah :

1. Bidang ekonomi ;
2. Bidang sosial, budaya dan pemerintahan ; dan
3. Bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

Selain dari bidang-bidang di atas, juga terdapat daftar inovasi yang ada. Inovasi ini terbagi dua, yaitu : inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dan inovasi daerah.

Kajian, penelitian, pengembangan dan inovasi yang dilakukan terhadap lokasi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**DAFTAR KAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN  
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017-2018**

NO	BIDANG/JUDUL KAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	LOKASI	TAHUN	SUMBER DANA			NAMA PENELITI/ INSTANSI/ LEMBAGA PENELITIAN	ABSTRAK/DESKRIPSI SINGKAT KAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN	PEMANFA ATAN HASIL PENELITI AN		KET.
				APBN/APBD	MANDIRI	PENYANDANG DANA			SUDAH	BELUM	
<b>1</b>	<b>BIDANG EKONOMI</b>										
1 1	Kajian Gambaran Status Reproduksi dan Profil Darah Sapi di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2018	√			1. Drh. Eka Oktarianti, M.Sc/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	Kejadian Gangguan reproduksi dapat dievaluasi berdasarkan status nutrisi dengan profil biokimia darah. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa unsur pokok biokimia darah diperlukan untuk menjaga fungsi normal beberapa sistem tubuh termasuk sistem reproduksi. Perubahan pada unsur-unsur biokimia darah tersebut akan menyebabkan terjadinya gangguan reproduksi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi gangguan reproduksi pada sapi di		√	

							Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan mengetahui profil biokimia darah sapi.			
1	2	Penyidikan Kasus Kematian Ayam Layer Yang Disebabkan Oleh Avian Influenza Subtype H5 Di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018	Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	2018	√		<p>1. Drh. Eka Oktarianti, M.Sc/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota</p> <p>2. Drh. Betty Indah Purnama, MP/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat</p>	<p>Avian influenza merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, dapat menyerang beberapa jenis unggas seperti ayam, kalkun, puyuh, burung peliharaan maupun burung liar dengan angka mortalitas yang tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan pemberian rekomendasi atau saran tindakan penanggulangan Avian Influenza (AI). Penyidikan dilakukan melalui pencarian kasus aktif terhadap unggas yang menunjukkan gejala klinis, wawancara terhadap peternak dengan kuisioner, observasi lingkungan dan pemeriksaan laboratorium (nekropsis bangkai dan PCR) oleh Balai Veteriner Bukittinggi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analisa sederhana, pembuatan kurva epidemik, dan perhitungan mortalitas. Berdasarkan hasil uji PCR oleh Balai Veteriner Bukittinggi</p>	√	<p>Diajukan pada Seminar karya ilmiah Outbreak Investigasi (OI) di Bali Bulan Nove mber 2018.</p>

								<p>terhadap swab kloaka dan lingkungan terhadap 53 sampel, menunjukkan bahwa 16 sampel positif terinfeksi virus avian influenza subtype H5.</p> <p>Sehingga diketahui bahwa penyebab kematian pada layer di Nagari Talang Maur adalah infeksi virus AI subtype H5. Kemungkinan sumber infeksi disebabkan karena penerapan biosekuriti yang tidak optimal, sehingga memudahkan transmisi penyakit. Pemberian rekomendasi tindakan pengendalian adalah peningkatan manajemen peternakan dan biosekuriti, melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi tentang tata cara program vaksinasi Avian Influenza.</p>			
1	3	Reproductive Disorder In Cows : Data Analysis of UPSUS SIWAB in Lima Puluh Kota District, 2017	Kabupaten Lima Puluh Kota	2017	√	√	1. Drh. Eka Oktarianti, M.Sc/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	The ministry of Agriculture has declared Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) to optimizing the potential of breeding cows and increase population (Ministry of Agriculture 2016). The success of UPSUS SIWAB program depends on decreased reproductive disorder. This paper aims to study the incidence of	√		Diajukan pada konferensi Karya ilmiah Veteriner Nasio

							<p>reproductive disorder on cows in Lima Puluh Kota District in 2017. The results of these studies are expected to serve as a basis for policy making for subsequent activities.</p> <p>Data obtained from ISIKHNAS report no.384. The data is processed using Microsoft Excel to calculate the number of cows that has been conducted examination and treatment of reproductive disorder in each sub-district in Lima Puluh Kota, as well as processing report of case development, recovery rate, artificial insemination and related pregnancy examination descriptively and frequency distribution.</p> <p>1.507 cows have been treated for reproduction disorder in 10 district. Data of artificial insemination (AI) in Kabupaten Lima Puluh Kota in 2017 is 17.178 acceptors, then the prevalence of reproductive disorder amounted to 11,4% (1507/17178). 1507 cows were treated by a veterinarian for reproductive disorder, and the incidence rates (%) were :</p>			<p>nal (KIV NAS) 2018 di Bali</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>persistent corpus luteum (CLP) 5,6% endometritis 6,6%, ovarian hypofunction 52,2%, silent heat 32%, follicular cystic 2,3%, luteal cystic 0,9% and ovari cystic (5/1507).</p> <p>Cows that recolve from reproductive disorder and follow with artificial insemination (AI) were 211 (14%), and 53 (3,5%) of cows having been pregnant thourgh perectal examination. Cows that recover from reproductive disorder are characterized by the emergence of symptoms of oestrus, especially in cows with diagnosis whilw CLP, endometritis, ovarian hypofunction, silent heat and luteal cyst. The length of time is based on the day that a cow needs to show signs of oestrus and the avarage AI is 74 days, and the follicular cyst is the fastest reproductive disorder case of an AI that is 18 days.</p>			
1 4.	Gambaran Gangguan Reproduksi Pada Sapi Dalam Kegiatan UPSUS SIWAB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun	Kabupat en Lima Puluh Kota	2017	√		1. Drh. Eka Oktarianti, M.Sc/ Dinas Peternakan	Kementerian Pertanian telah mencanangkan Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017 dan	√		Dipre senta sikan pada semi

	2017					dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	<p>masih berlangsung sampai tahun 2018 ini. Penanggulangan gangguan reproduksi merupakan salah satu kegiatan yang menentukan keberhasilan program UPSUS SIWAB. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kejadian gangguan reproduksi pada sapi dalam kegiatan UPSUS SIWAB di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 serta mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya gangguan reproduksi pada sapi.</p> <p>Data kejadian gangguan reproduksi diperoleh dari laporan ISIKHNAS (integrated Sistem Kesehatan Hewan Nasional) no. 384 di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017. Data dianalisa secara deskriptif dan frekuensi distribusi untuk mengetahui gambaran diagnosa sementara kejadian gangguan reproduksi, pengobatan, perkembangan kasus, tingkat kesembuhan, hewan yang diInseminasi Buatan (IB) dan ternak yang bunting setelah dilakukan</p>			nar peng emba ngen Peter naka n Sapi Poto ng untu k Mend ukun g Keta hana n Pang an di ITC Paya kumb uh 8 Mei 2018
--	------	--	--	--	--	---	---	--	--	--

							<p>pengobatan gangguan reproduksi. Identifikasi faktor resiko dilakukan pada 100 ekor sapi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang dipilih secara random melalui kuisisioner dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh dianalisa secara univariat dan bivariat (uji chi-square (<math>\chi^2</math>) dan odds ratio), dengan menggunakan software Statistic for Windows Version 8.</p> <p>Hasil kajian menunjukkan bahwa ternak yang mengalami gangguan reproduksi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 sebanyak 1507 ekor, dengan rincian hipofungsi ovaria 52,2%, (786/1507), silent heat 32% (482/1507), 6,6% (99/1507) endometritis. Perkembangan kasus (PK) yang dilaporkan 67,7% (1013/1507), tingkat kesembuhan 36,5% (550/1507), inseminasi buatan (IB) 211 ekor (38,4%), dan 53 ekor (25,1%) sapi bunting. Lama waktu yang dibutuhkan seekor ternak untuk dapat sembuh dari gangguan reproduksi rata-rata 74,2 hari. Hasil kajian</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							identifikasi faktor resiko menunjukkan bahwa status laktasi, skor kondisi tuuh kurus, pengalaman beternak kurang dari 2 tahun, dan pengetahuan tentang waktu kawin yang tepat beasosiasi meningkatkan kejadian gangguan reproduksi pada ternak di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.			
1 5	Gambaran Kejadian Gangguan Reproduksi di Sumatera Barat Tahun 2016 dalam rangka Mendukung Kegiatan Identifikasi Ternak pada UPSUS SIWAB	Kabupaten Lima Puluh Kota	2016	√		1.Drh. Eka Oktarianti, M.Sc/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah mengejar swasembada sapi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2026 serta mewujudkan kemandirian pangan asal hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dengan mengoptimalkan potensi sapi indukan untuk menghasilkan pedet dan meningkatkan populasi. Penanggulangan gangguan reproduksi merupakan salah satu kegiatan yang iut menentukan keberhasilan program UPSUS SIWAB. Gangguan reproduksi ditandai dengan rendahnya fertilitas induk, yang	√		Dipresentasikan pada RATE KPIL Solo tahun 2016 (proseding)

								<p>menyebabkan penurunan angka kebuntingan dan jumlah kelahiran pedet sehingga mempengaruhi penurunan populasi sapi dan pasokan penyediaan daging secara nasional. Adanya penyakit-penyakit yang akan mengganggu kemampuan reproduksi perlu diketahui dan dipetakan dengan akurat, sehingga upaya pengendalian, pencegahan dan penanganannya bisa dilakukan secara optimal, disamping kegiatan evaluasi dan monitoring penyakit gangguan reproduksi tersebut.</p> <p>ISIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem pelaporan penyakit melalui i-Sikhnas diharapkan dapat memberikan informasi secara akurat dalam upaya pengendalian, pencegahan dan penanganan penyakit reproduksi. Gangguan reproduksi pada ternak di Sumatera Barat berdasarkan rekapitulasi laporan petugas kesehatan hewan ke isikhsa pada tahun 2016 menunjukkan hasil bahwa ternak yang</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							mengalami distokia adalah sebanyak 127 ekor, retensi palsu 125 ekor, 98 ekor mempunyai tanda anestrus atau tidak menunjukkan tanda-tanda birahi, ternak dengan tanda kawin berulang sebanyak 29 ekor, ternak yang mengalami prolaps rahim 23 ekor, keguguran 9 ekor, dan sebanyak 7 ekor ternak mengalami prolaps vagina. Hasil rekapitulasi tersebut hendaknya dapat menjadi dasar dalam melakukan pendataan dan identifikasi ternak sebelum dilakukan inseminasi buatan maupun kawin alam.			
1 6	Optimalisasi Peranan Masyarakat Dalam Penanggulangan Rabies Melalui Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Rabies di Nagari Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Nagari Tungka, Kecamatan Situjuh Limo Nagari	2017	√		1. Drh. Eka Oktarianti, M.Sc/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	Survei ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan rabies melalui pembentukan Forum Masyarakat Peduli Rabies di Nagari Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, mengetahui prevalensi protektifitas antibodi 12 bulan (1 tahun) pasca vaksinasi rabies pada anjing dan mengetahui asosiasi antara			Telah dipresentasikan pada RATE KPIL Propinsi Sumatera Barat di Padang Tahun

							<p>titer antibodi rabies terhadap manajemen pemeliharaan anjing.</p> <p>Dilaksanakan bulan Mei tahun 2017 di Nagari Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Rabies merupakan kolaborasi dan koordinasi antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan/ Puskesmas, Pemerintahan Nagari dan Persatuan Buru Babi (PORBI) serta melibatkan pemuka masyarakat setempat. Pengambilan sampel secara tahapan ganda proporsional. Sebanyak 40 ekor anjing yang telah divaksin pada bulan Mei 2016, diambil sampel darahnya. Wawancara melalui kuisisioner dilakukan terhadap pemilik anjing. Data kuisisioner dikumpulkan dan dianalisis secara unviriat dan bivariat dengan (uji chi-square (<math>\chi^2</math>) dan odds ratio (OR).</p> <p>Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Rabies menunjukkan adanya peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan rabies di Nagari Tungka Kecamatan</p>			<p>n 2017</p> <p>Telah diterima pada 15th International Symposium of Veterinary epidemiology and economics (ISVEE 15) di Chiang Mai, Thailand pada 16 November</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								<p>Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan vaksinasi rabies, penyuluhan, observasi hewan tersangka rabies, pendataan hewan-hewan penular rabies (HPR), pelaporan kasus dan respon cepat rabies. Survei protektifitas antibodi 12 bulan pasca vaksinasi rabies pada anjing menunjukkan prevalensi sebesar 35%. Faktor risiko yang mempengaruhi protektifitas titer antibodi adalah anjing yang berada di Jorong Dalam Nagari, anjing yang berfungsi sebagai anjing buru dan cara pemeliharaan yang dikandangan dan cara pemeliharaan yang diikat. Disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam penanggulangan rabies dapat dioptimalkan melalui pembentukan Forum Masyarakat Peduli Rabies, sedangkan titer antibodi 12 bulan pasca vaksinasi rabies sudah menunjukkan protektifitas yang rendah sehingga harus segera</p>			2018
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



							dilakukan pengulangan vaksinasi rabies.				
1 7	Penyidikan Kejadian Kematian Sapi Bali Yang Diduga Disebabkan oleh Jembrana di Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016	Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota	2016	√			1. Drh. Eka Oktarianti, M.Sc/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	Sejak pertama kali outbreak di Sumatera Barat tahun 1992 Balai Veteriner Bukittinggi telah melakukan monitoring penyakit Jembrana dan belum pernah ditemukan kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada bulan Oktober tahun 2016, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Balai Veteriner Bukittinggi melakukan penyidikan terhadap kasus kematian mendadak pada sapi bali di Jorong Panang Nagari Tanjung Baliak Kecamatan Pangkalan Kotobaru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan gejala diduga terinfeksi Jembrana. Tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi, melakukan pengambilan dan pengajuan sampel, mengidentifikasi kemungkinan sumber/ rute infeksi, mengidentifikasi faktor-faktor resiko, analisis data serta emberian saran tindakan pengendalian. Penyidikan dilakukan melalui pencarian kasus aktif			Dipresentasikan pada RATE KPIL Kementerian Pertanian di Yogyakarta tahun 2018 (proseding)

							<p>terhadap ternak yang menunjukkan gejala klinis, wawancara terhadap peternak dengan kuisisioner, observasi lingkungan dan pemeriksaan laboratorium (nekroskopi bangkai dan PCR) oleh Balai Veteriner Bukittinggi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analisa sederhana, pembuatan kurva epidemik, dan perhitungan mortalitas. Berdasarkan kerangka waktu dan kurva epidemik, kisaran masa inkubasi adalah 4-12 hari. Angka mortalitas 30%, dengan diagnosa banding Bovine Ephemeral Fever (BEF).</p> <p>Peneguhan diagnosa dilakukan dengan nekroskopi dan PCR terhadap ternak yang menunjukkan gejala klinis. Hasil nekroskopi menunjukkan terjadinya pembesaran lien dan perdarahan pada organ jantung, dan hasil uji PCR terhadap serum darah dan organ pada 5 ekor sapi menunjukkan hasil positif terinfeksi jembrana. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							diketahui bahwa penyebab kematian pada sapi bali adalah terinfeksi penyakit jembrana. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa kemungkinan sumber infeksi berasal dari pemasukan sapi bali dari daerah endemis dan telah terinfeksi jembrana, serta kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sapi bali oleh peternak. Pemberian rekomendasi tindakan pengendalian adalah peningkatan manajemen peternakan dan biosekuriti, melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi tentang tata cara pemasukan ternak dari luar daerah.			
1 8	Survei Brucellosis pada Sapi di UPT Peternakan dan Puskeswan Wilayah III Kabupaten Lima Puluh Kota	Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	2016	√		1. Drh. Eka Oktarianti, M.Sc / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Drh. Betty Indah Purnama, MP/ Dinas	Brucellosis adalah penyakit zoonosis yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan berdampak terhadap kesehatan manusia, terutama di negara berkembang. Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2009 telah dinyatakan bebas brucellosis, kegiatan penyelidikan dan pengawasan (surveillance) yang merupakan bagian dari program pencegahan dan penanggulangan brucellosis			Dipresentasikan ada World Association Of Advanced Veterinary of Paras

							<p>Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat</p> <p>telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mempertahankan status bebas dan melindungi ternak dari brucellosis. Tujuan penelitian ini adalah identifikasi brucellosis pada sapi, serta menggambarkan manajemen peternakan di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Peternakan dan Puskeswan Wilayah III. Sejumlah 100 ekor sapi di Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Situjuh Lmo Nagari digunakan dalam sebuah kajian deteksi penyakit. Sampel pada tingkat kecamatan dan nagari berdasarkan alokasi proporsional (proportional sampling), sedangkan sampel pada jorong diambil secara random.</p> <p>Penentuan status brucellosis adalah reaksi positif Complement Fixation Test (CFT) dari reaktor positif Rose Bengal Test (RBT). Hasil penelitian menunjukkan prevalensi brucellosis di UPT Peternakan dan Puskeswan Wilayah III adalah negatif, tidak ada ternak sapi yang positif RBT berdasarkan</p>			<p>itolog y di Kuala Lumpur bulan Oktober 2017</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>pemeriksaan sampel oleh BLKKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Hasil analisa bivariat terhadap karakteristik peternak dengan manajemen peternak yang berisiko tinggi terhadap kejadian brucellosis adalah jenis kelamin perempuan, umur peternak, pendidikan dan tipologi peternak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prevalensi brucellosis pada sapi negatif, namun beberapa karakteristik peternak secara signifikan berasosiasi dengan manajemen peternakan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya brucellosis.</p>			
1 9	<p>Survey Penyakit Parasit Darah pada Sapi di UPT Peternakan dan Puskesmas Wilayah III Kabupaten Lima Puluh Kota</p>	<p>Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota</p>	2015	√			<p>1. Drh. Eka Oktarianti, M.Sc / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Drh. Betty Indah Purnama, MP /</p>	<p>Parasit darah adalah penyakit yang bersifat endemik terutama di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Parasit darah yang penting di Indonesia adalah anaplasmosis, Babesiosis dan Theileriosis. Parasit darah berdampak secara ekonomi terhadap usaha sektor peternakan karena dapat menimbulkan kerugian. Survey ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi parasit</p>			<p>Dipresentasikan pada RATE KPIL SOLO tahun 2016 (proceeding)</p>

							<p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>darah, serta faktor yang mempengaruhi kejadian parasit darah. Survey dilakukan terhadap 100 ekor sapi potong yang diambil sampel darah di wilayah kerja UPT Peternakan dan Puskesmas Wilayah III pada dua Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru). Pengambilan sampel dilakukan pada kelompok ternak sapi dengan metoda sampel alokasi roporsional (Proportional Sampling). Data kuisisioner dikumpulkan dan diolah menggunakan Stasisx for Windows Version 8 software. Analisis data meliputi : analisis univariat dan bivariat dengan dengan chi-square (<math>\chi^2</math>) dan odds ratio (OR). Hasil survey menunjukkan bahwa prevalensi kejadian parasit darah adalah 97%, kejadian parasit darah akibat infeksi oleh Babesia sp. sebesar 11%, prevalensi infeksi penyakit Theileria sp. adalah 89%, dan prevalensi kejadian parasit darah yang disebabkan oleh Anaplasma</p>			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							sp. adalah sebesar 50%. Faktor yang berasosiasi meningkatkan kejadian parasit darah adalah tipologi peternak, pengalaman beternak, tempat pakan, ketersediaan air, frekuensi memandikan sapi, frekuensi penanggulangan vektor, tempat penampungan kotoran, tipe lantai, sistem pemberian pakan, pengetahuan tentang parasit darah, dan cara penggunaan isnektisida. Hasil survey ini dapat disimpulkan bahwa kejadian parasit darah pada sapi potong disebabkan oleh multifaktor.			
1 10	Kajian Lintas Seksional dan Profil Biokimia Darah Kejadian Anestrus pada Sapi Potong di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan Jawa Tengah	2013	√		1.Drh. Eka Oktarianti, M.Sc / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota 2.Dr. Drh. Surya Agus Prihatmo, MP / Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta	Anestrus merupakan gangguan fungsional pada siklus reproduksi ternak yang ditandai dengan tidak adanya gejala estrus. Anestrus disebabkan oleh banyak faktor dan dapat menyebabkan turunnya produktivitas dan reproduktivitas ternak, sehingga pencegahan dan pengendalian kejadian anestrus diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi anestrus, faktor yang			Tesis Telah diterima pada the 15th International Symposium of Veterinary

							<p>3. Prof. Dr. Drh. Bambang Sumiarto, S.U, M.Sc / Faklutas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta.</p>	<p>mempengaruhi kejadian anestrus serta profil biokimia darah pada sapi potong yang mengalami anestrus. Penelitian ini menggunakan kajian lintas seksional, dilakukan terhadap 228 ekor sapi potong yang diperiksa secara perrektal di lima kecamatan di Kabupaten Grobogan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling tahapan ganda secara proporsional dan random sederhana pada tingkat kecamatan dan desa, sedangkan ternak diambil secara klaster. Data kuisisioner dianalisa dengan statistix for windows version 8 software, meliputi: analisis univariat, bivariat dengan chi-square (<math>\chi^2</math>) dan odds ratio (OR), dan multivariat dengan regresi logistik. 40 ekor ternak (20 ekor sapi anestrus dan 20 ekor fertil), dipilih secara random digunakan untuk menganalisa profil biokimia darah (glukosa, total protein, kolesterol, kalsium dan fosfor). Pengujian biokimia serum darah dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT)</p>			<p>Epid omology and epide milogy and Econ omic (ISVE E 15) di Chian g Mai, Thail and 12 Nove mber 2018.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



								<p>UGM Yogyakarta. Profil biokimia darah dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi anestrus pada sapi potong di tingkat ternak dan peternakan masing-masing 18,4% dan 19,2%. Faktor yang berasosiasi meningkatkan kejadian anestrus pada tingkat ternak adalah laktasi, retensi plasenta, distokia, jenis pakan jerami, dan anestrus postpartus, sedangkan faktor yang berasosiasi meningkatkan kejadian anestrus di tingkat peternakan adalah pengalaman beternak kurang dari dua tahun dan kondisi kandang yang kotor. Analisis biokimia serum darah menunjukkan hasil bahwa kadar glukosa, total protein, kolesterol, kalsium dan fosfor sapi potong yang mengalami anestrus dan sapi potong yang fertil masih berada dalam kadar normal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anestrus pada sapi potong disebabkan oleh multifaktor, dan profil biokimia darah sapi potong yang mengalami</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							anestrus dan yang fertil berada dalam kadar normal.				
1 11	Situasi Pola Pangan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	2013-2017	√			1.Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	<p>Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui gambaran pola konsumsi pangan masyarakat secara berkesinambungan baik secara kuantitas maupun kualitas agar pembangunan ketahanan pangan khususnya terkait penganekaragaman konsumsi pangan dapat lebih terarah dan terintegrasi.</p> <p>Metoda Penelitian : Wawancara menggunakan kuisioner menggunakan teknik <i>food resealed</i> yaitu responden diminta untuk mengingat kembali makanan yang sudah dikonsumsi oleh keluarga selama 24 jam terakhir.</p> <p>Responden/ Sampel : Ibu rumah tangga yang dipilih secara acak di 2 (dua) nagari di setiap kecamatan dengan jumlah sampel sebanyak 70 KK/ kecamatan setiap tahunnya.</p> <p>Hasil : Penelitian menggambarkan pola konsumsi pangan masyarakat yang dibandingkan dengan tingkat kecukupan gizi yang</p>			

								dianjurkan menurut WKNPG (Widya karya Nasional Pangan dan Gizi) secara kuantitas pola konsumsi pangan dinilai dari tingkat konsumsi energi dan protein rata-rata penduduk (perkapita/hari) yaitu untuk tingkat konsumsi energi dengan standar 2.000-2.150 kkal/kap/hr dan protein dengan standar 52-57 gr/kap/hr. Adapun perkembangan pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2013-2017 dapat disimpulkan pola konsumsi masyarakat belum menunjukkan adanya keragaman .			
1 12	Survey Ketersediaan Pangan Tingkat Rumah Tangga	13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	2013-2017	√			1. Kantor Ketahanan Pangan/ Dinas Pangan	Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui ketersediaan pangan tingkat rumah tangga dari segi ketersediaan beras minimal untuk dikonsumsi, ketersediaan beras yang harus tersedia, mengetahui ketersediaan energi (2400 kkal/kapita/hari), mengetahui ketersediaan protein (63 gram/kapita/hari), sumber ketersediaan pangan dan ketersediaan pangan dilihat dari pendidikan, pekerjaan,			

							<p>pendapatan dan jumlah anggota keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota.</p> <p>Metode Penelitian: Wawancara menggunakan kuisisioner, observasi dan pencatatan langsung ke lapangan dengan cara responden diminta untuk menjelaskan sumber ketersediaan karbohidrat, protein, sayur dan buah-buahan dalam 1 minggu.</p> <p>Responden/ sampel : Ibu rumah tangga yang dipilih secara acak disetiap Nagari disetiap Kecamatan dengan jumlah sampel sebanyak 90 KK/ kecamatan.</p> <p>Hasil: Penelitian menggambarkan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga terhadap ketersediaan beras minimal (275gr/kapita/hr) untuk dikonsumsi, ketersediaan beras yang harus tersedia (300gr/kapita/hr), ketersediaan energi (2.400 kkal/kapita/hari) dan protein (63 gr/kapita/hari). Adapun hasil survey ketersediaan energi dan protein masih menunjukkan belum terpenuhinya standar energi</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga diperlukan program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat terkait konsumsi energi dan protein.			
1 13	Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kabupaten Lima Puluh Kota	2013-2017	√			1. Kantor Ketahanan Pangan/ Dinas Pangan <p>Tujuan Analisis:  Untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/ pengadaan (supply), dan penggunaan/ pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun).  Metode penyusunan:  Pengumpulan dan pengolahan data dari instansi terkait dan pihak-pihak yang sangat relevan.  Jenis data:  Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang telah dipublikasikan dan cenderung yang mempunyai legalitas dari BPS. Data yang diolah data tetap tahun yang lalu, data sementara tahun berjalan dan data ramalan tahun berikutnya.  Hasil:  Analisa menggambarkan ketersediaan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota</p>			

							berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) dan Ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG).				
1 14	Pembuatan Desain Perairan Umum Daratan/ Lubuk Larangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Perairan Umum Daratan di Kabupaten Lima Puluh Kota	2013	√			1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta	Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi luas perairan umum daratan dan kawasan lubuk larangan serta potensi untuk pengembangannya. Metode yang dilakukan adalah menghitung potensi perairan umum, metode penentuan kesesuaian perairan umum untuk kawasan lubuk larangan. Dari hasil penelitian ini didapatkan potensi ikan yang tertinggi terdapat di Sungai Batang Sinamar Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh, sedangkan keanekaragaman jenis ikan dari 21 Lubuk Larangan terdapat 28 jenis spesies. Jenis ikan yang dapat didomestikasi dan dibudidayakan dari Famili <i>Cyprinidae</i> adalah ikan tabingalan, garing, barau, lelan, kapie, motan. Famili <i>Bagridae</i> adalah ikan baung dan geso, dari famili <i>Notopteridae</i> yakni ikan belida. Dengan dilakukan			

							penelitian ini diharapkan meningkatkan potensi produksi ikan disetiap lokasi lubuk larangan.			
1 15	Kajian Penilaian Kesesuaian Suaka Perikanan di Perairan Umum Daratan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Perairan Umum Daratan di Kabupaten Lima Puluh Kota	2014	√			1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta	Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi luas kawasan suaka perikanan, jenis ikan dan keberadaannya serta mendeskripsikan kondisi fisik, kimia, biologi yang ada di suaka perairan umum yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan ini diharapkan dalam pengelolaan perairan umum sungai dapat diketahui kawasan yang dikonservasi untuk pelestarian keanekaragaman jenis ikan dan mengetahui potensi ikan disuaka perikanan perairan umum sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota.		
1 16	Penyusunan Naskah Akademik Kajian Potensi Reproduksi dan Pencapaian Pertumbuhan Plasma Nutfah Ikan Gurami asal Lima Puluh Kota	Nagari Andaleh, Nagari Mungo Kecamatan Luak dan Nagari Bukik Sikumpa Kec.	2014	√			1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta	Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penyebab penurunan kualitas produksi benih ikan gurami, yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan di Kabupaten Lima Puluh Kota ada 5 ras ikan gurami yakni tambago, palapah, merah, jepun dan krista, diantara		

		Lareh Sago Halaban Nagari VII Koto Talago, Kec. Guguak						jenis ras ini yang mempunyai nilai variasi genetik tertinggi terdapat pada jenis ras Krista dan yang terendah terdapat pada ras tambago, ras ini sudah digunakan dalam waktu cukup lama didalam proses pemijahan sehingga sudah terjadi perkawinan sekerabat yang mengakibatkan turunnya produksi benih, dan parameter kualitas air yang kurang baik akibat terkontaminasi dengan air kolam yang digunakan untuk pembenihan ikan lele, ini juga merupakan faktor dalam menurunnya produksi benih. Maka dari itu, untuk meningkatkan produksi benih diharapkan pembudidaya dapat melakukan kawin silang antar ras induk ikan agar dapat diketahui pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Untuk itu perlu dilakukan seleksi masal terhadap benih ikan gurami untuk calon induk, perlu dilakukan pemuliaan populasi.			
1 17	Kajian Penentuan Jumlah Keramba Jaring Apung dan Lokasi di Waduk Koto Panjang Berdasarkan Daya	Waduk Koto Panjang, Nagari Pangkal	2015	√			Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kajian ini dilaksanakan untuk melakukan analisis kelayakan lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan budidaya ikan dalam keramba jaring			



	Dukung Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat	an Kec. Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota				(LPPM) Universitas Bung Hatta	<p>apung dengan menggunakan analisis multi kriteria dan sistem informasi geografis. Dari hasil analisa daya dukung lingkungan untuk budidaya ikan di waduk PLTA Koto Panjang termasuk kategori baik. Lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pembudidayaan ikan dengan KJA seluas 68,22 hektar. Faktor yang mempengaruhi tingginya daya dukung lingkungan budidaya ikan dengan KJA adalah kualitas air yang sangat bagus dan lahan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ investor. Sedangkan spesies yang berpeluang untuk dibudidayakan adalah pembesaran ikan nila dan majalaya. Berdasarkan daya dukung perairan maka jumlah daya dukung KJA adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis ikan Mas Majalaya sebanyak 990 unit.</li> <li>2. Jenis ikan Nila sebanyak 1218 unit.</li> </ol>			
1 18	Penyusunan Penilaian dan Penyusunan Naskah Akademik Pelepasan Ikan Baru	Nagari Mungo, Kecamatan Luak	2016	v		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada	Ikan Kalui merah adalah salah satu ikan spesifik lokal perairan Indonesia yang habitat asalnya hanya			

	Gurami Merah Asal Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota				Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta	<p>terdapat di Kolam Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dari itu perlu pelestarian ikan spesifik lokal ini dilakukanlah kegiatan domestikasi melalui pengembangan teknologi budidaya ikan kalui merah. Tahap awal kegiatan domestikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2001 dilakukan dengan mengoleksi benih ikan dari alam, dan selanjutnya diadaptasikan pada lingkungan budidaya sampai menjadi calon induk yang disebut dengan Generasi Awal (G0).</li> <li>2. Pada tahun 2005 G0 ini dipijahkan dan dipelihara mencapai ukuran induk yang dinamakan Generasi Pertama (G1).</li> <li>3. Pada tahun 2010 G1 ini diproduksi dipelihara mencapai ukuran induk yang disebut Generasi Kedua (G2) dan</li> <li>4. Pada tahun 2015</li> </ol>			
--	---	---------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

							<p>telah dihasilkan benih ikan generasi kedua (G2) dan benih ini dibesarkan di KJA danau Maninjau, dengan melakukan uji toleransi, pertumbuhan dan padat tebar.</p> <p>5. Pada tahun 2016 ujian pelepasan ikan kalui merah.</p> <p>6. Pada tahun 2017 penerbitan Kepmen KP No. 56 Tahun 2018 Tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago.</p>			
1 19	Identifikasi Jenis Ikan Hias Alamiah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Rangka Mengisi Peluang Pasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	2016	√		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis ikan hias yang hidup di perairan umum daratan Kabupaten Lima Puluh Kota yang didasarkan pada habitat dan skala prioritas yang dapat dikembangkan di Hatchery ikan hias. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk merencanakan dan merancang pengembangan komoditi ikan hias asli Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya memanfaatkan</p>			

							hatchery ikan hias milik Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.			
1 20	Studi Kelayakan Lokasi Pengembangan Ikan Hias	Kabupaten Lima Puluh Kota	2016	√		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta	Hasil studi ini berisi tentang rencana kegiatan pembangunan Hatchery dan kolam untuk pengembangan ikan hias di jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, rona lingkungan hidup berbagai jenis dampak yang dapat terjadi serta berbagai upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang akan dilakukan. Hasil survey ini akan menghasilkan izin lingkungan atas kegiatan/usaha rencana pembangunan hatchery dan pengembangan ikan hias Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.			
1 21	Penilaian Kesesuaian Lokasi Suaka Perikanan di Batang Kapur Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota	Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota	2013		v	Susy Letrini, S.Pi, M.Si	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan Pokmaswas dalam pengelolaan suaka perikanan Sosa, menganalisis spesies ikan, status tropik suaka perikanan dan menganalisis kesesuaian lokasi suaka perikanan Sosa. Hasil penelitian ini menunjukkan suaka perikanan Sosa berfungsi baik dan sangat efektif, terdapat 23			

							spesies ikan yang hidup di suaka ini diantaranya terdapat 1 spesies endemik dan langka yakni ikan Tabingalan ( <i>Puntiopltes bulu</i> ) dan spesies ikan yang dominan yakni Kapiék ( <i>Barboides schwanifeldi</i> ). Hasil analisa kualitas air menunjukkan bahwa perairan suaka perikanan Sosa belum tercemar dan memenuhi kriteria baku mutu kualitas air untuk perikanan.			
1 22	Diversifikasi Pendapatan Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Umum Daratan Melalui Pembentukan Kampung Garing	Jorong Landai, Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	2017		√	Susy Letrini, S.Pi M.Si	Penelitian ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan di kawasan konservasi perairan umum daratan yang pada umumnya hanya pada kegiatan pengawasan lubuk larangan yang merupakan kearifan lokal masyarakat sehingga di kawasan ini tidak dapat diandalkan untuk menopang perekonomian di masyarakat sekitarnya. Dengan inovasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat keberadaan kawasan konservasi perairan dengan melakukan usaha pembudidayaan ikan yang diyakini dapat meningkatkan			

1 23	Study Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Sektor Perikanan	Nagari Mungo, Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota	2016	√		Tajul Arifin, S.Pi, M.Si	pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat model pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dimana unit usaha perikanan menjadi unit usaha unggulan dalam penyelenggaraan BUMNag di Nagari Mungo Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota.			
1 24	Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Lima Puluh Kota	2016	√		1. Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, MS 2. Fadli Irsyad, S.TP, M.Si 3. Eri Stiyanto, S.TP, M.Si (Kerjasama Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Andalas)	Isu ketahanan pangan masih menjadi pokok permasalahan di Indonesia dalam menyediakan bahan pokok terutama beras. Sawah merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan yang sangat strategis karena sawah merupakan sumber daya utama untuk memproduksi padi/beras. Permasalahan konversi lahan pertanian terutama lahan sawah di Indonesia sudah menjadi perhatian sejak tahun 1980an. Selama periode ledakan ekonomi 1980-1990, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan berlangsung secara masif. Artinya ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi lahan pertanian, yang merupakan lahan pendukung untuk			

							memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang dengan laju pertumbuhan produksi padi semakin membuat ketimpangan akan ketahanan pangan, dimana laju produksi dibawa 0.5 %. Masalah lainnya adalah kompetisi pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor yang semakin ketat dan rencana alih fungsi lahan sawah yang sangat dasyat berdasarkan RTRW kabupaten/kota seluas 3,09 juta ha dari 7,8 juta ha lahan sawah menjadi pemukiman, perindustrian, dan lain-lain. Sebagai upayaantisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2016, akan melakukan kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.			
1 25	Peran dan Jaringan Lembaga Untuk Pengembangan Kawasan Agroindustri Berbasis Ubi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	1. Rini Hakimi, SP, M.Si 2. Ruhan Ifebri, SP, M.Si 3. Rika Anggela, SP 4. Roni	Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan penelitian yang berjudul Analisis Jaringan Lembaga dalam Rnagka Pengembangan Kawasan Agroindustri Berbasis Ubi di Kabupaten			

						Afrinandos	Lima Puluh Kota. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa lembaga formal atau lembaga pemerintah yang berperan dalam pengembangan agroindustri berbasis ubi dapat berupa perangkat pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga di bawah Kementerian langsung, sedangkan lembaga non formal yang berperan diantaranya petani, pedagang, konsumen, koperasi, lembaga keuangan swasta dan perguruan tinggi swasta. Jaringan lembaga yang ditemukan memperlihatkan adanya lembaga yang berinteraksi langsung dan ada lembaga yang tidak berinteraksi langsung dengan agroindustri berbasis ubi.			
1 26	Analisis Risiko Usaha Tani Padi pada Musim Hujan dan Musim Kemarau di Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	Rika Anggela/ Universitas Andalas				
1 27	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi	Kabupaten Lima	2018		√	Nu Eliya Insani/ Universitas				



	Investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Puluh Kota				Andalas			
1 28	Persepsi dan Kesediaan Membayar (Willingness to Pay) Petani Terhadap Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	Dwi Nanda Syukriyah/ Universitas Andalas			
1 29	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Gambir di Daerah Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	Andesri Mulya/ Universitas Andalas			
1 30	Analisis Pertumbuhan dan Proyeksi Jenis-Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	2018		√	Tri Okta Hesti Ningrum/ Universitas Andalas			
1 31	Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (Studi UKM Rendang Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota)	Kab. Lima Puluh Kota	2018		√	Yani Agus/ Universitas Andalas			
<b>2</b>	<b>SOSIAL BUDAYA</b>								
2 1	Struktur dan Fungsi Sosial Legenda Setempat Pincuran	Kec. Payakumbuh	2018		√	Yosi Novita Sari/ Universitas Negeri Padang			

		Tujuh di Kenagarian Koto Tengah Simalanggang Desa Kapalo Koto Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota								
2	2	Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Usia 3-6 Bulan di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Payakumbuh	2018	√		Meisa Novarina/ Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang			
2	3	Hubungan Sikap Keluarga, Sarana Prasarana, dan dukungan Petugas Kesehatan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Sehat di Nagari Solok Bio-Bio Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017	Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	2018	√		Nurhasanah / STIKES Fort De Kock			
2	4	Kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian dan	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018	√		Nailatul Fadiah / Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat			

	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota)									
2 5	Pelaksanaan Hak Pidana Untuk Mendapatkan Perawatan Jasmani dan Rohani di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√		Mursyid Marjalis / Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat			
2 6	Pelaksanaan Kewajiban Hadnah Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (Tinjauan Dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak)	Kec. Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√		Zellyn Indria Nilsa/ IAIN Batusangkar			
2 7	Biografi H. Sajoeti Tokoh Penyelamat dan Pengembangan Pendidikan di Nagari Maek Kabupaten Lima Puluh Kota	Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan.	2018		√		Fransisca Hari P/ Universitas Negeri Padang			
2 8	Pengaruh Penerapan Pendekatan Problem Solving Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Self Efficiency Siswa Kelas VIII SMP 2 Kecamatan Lareh Sago Halaban	Kec. Lareh Sago Halaban	2018		√		Rahmadayanti / IAIN Batusangkar			

2 9	Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota : Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018	√	Atira Diva Rahma / Universitas Andalas			
2 10	Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Perubahan Pengetahuan dan Sikap Pada Ibu Balita Untuk Pencegahan dan Penanggulangan ISPA tahun 2017	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018	√	Fitratul Asna/ STIKES Fort De Kock			
2 11	Analisis Strategi Promosi Kesehatan Terhadap Penyakit Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018	Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	2018	√	Diana Safitri/ STIKES Fort De Kock			
2 12	Profil Konsep Diri Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Lareh Sago Halaban	2018	√	Annisa Lestari/ IAIN Bukittinggi			
2 13	Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018	√	Muhammad Hafiz / Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau			
2 14	Pengembangan Produk	Kec.	2018	√	Syaiful Adli/			

	Sampan Wisata Pada Objek Wisata Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota	Harau Kabupaten Lima Puluh Kota				Univeristas Andalas				
2 15	Perancangan Sistem Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	Mahmuda/ Universitas Andalas				
<b>3</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>									
3 1	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 Dalam Pemberian Sanksi Bagi Pegawai Negeri	Kabupat en Lima Puluh Kota	2018		√	Windi Medya Sari/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat				
3 2	Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)	Kabupat en Lima Puluh Kota	2018		√	Desami Putri / Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat				
3 3	Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari Untuk Penguatan Demokrasi Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang	Kecamat an Harau, Kabupat en Lima Puluh Kota	2018		√	Tiarany Gsuman/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat				

	Desa (Studi Pada Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota)									
3 4	Peranan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Mengembangkan Potensi Objek Pariwisata Lembah Harau.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√		Fajri Kurniawan Septadi Away/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
3 5	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Kubu Gadang Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Kecamatan Payakumbuh	2018		√		Liza Gusmiranti/ Universitas Islam Negeri			
3 6	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi	Kec. Harau, Kec. Pangkalan dan Kec. Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√		Putri Aulia / Universitas Riau			

	Empiris Pada Kecamatan Harau dan Kecamatan Pangkalan Kotobaru dan Kecamatan kapur IX)									
3 7	Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Harau kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√		Khairil Fajri/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
3 8	Perancangan Website Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Polres Lima Puluh Kota Berbasis Web.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√		Andiak Priatma Disra/ STMIK Jayanusa			
3 9	Strategi Penanggulangan Pengangguran Oleh Dinas Industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	2018		√		Novita Yulianti/ Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau			
3 10	Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten	Kab. Lima Puluh Kota	2018		√		Bobi Prima Putra/ Universitas Andalas			

	Lima Puluh Kota									
<b>4</b>	<b>INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG</b>									
4 1	Perencanaan Sinergi Pembangunan Pertanian Pangan Dengan Perumahan dan Permukiman Dalam Perspektif Perencanaan Wilayah Menuju Pembangunan Berkelanjutan	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof.Dr.Ir.Melinda Noer, M.Sc</li> <li>2. Yossyfra, ST, M.Eng, Ph.D</li> <li>3. Rini Hakimi, SP, M.Si</li> <li>4. Dr. Muhammad Reza, S.Pt, M.Si</li> </ol>	Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan penelitian yang berjudul Kajian Kompetisi Lahan Pembangunan Pertanian Pangan Dengan Perumahan dan Permukiman Dalam Perspektif Perencanaan Wilayah Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Barat. Hasil penelitian tahun lalu memperlihatkan bahwa terdapat bangunan perumahan dan kawasan permukiman di atas lahan pertanian. Ditemukan bahwa belum ada sinergitas baik dari kebijakan maupun implementasi perencanaan pembangunan pertanian dan perumahan permukiman di tingkat Kabupaten. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam bentuk UU No.41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).			
4 2	Strategi Pemberdayaan	Kabupaten	2018		√	Maytia Sari /				



	Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kampar di Nagari Muara Paiti, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota	en Lima Puluh Kota				Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat				
4 3	Studi Geologi Daerah Koto Bangun Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	Kec. Pangkalan Koto Baru	2018		√	Bona Panyusunan/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
4 4	Studi Geologi Daerah Batang Lolo dan Sekitarnya Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	M. Satrio Ramdani/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
4 5	Studi Geologi Daerah Koto Lamo, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	Ustya Widya Ningrum/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
4 6	Studi Daerah Lubuk Alai dan Sekitarnya Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	Rafiqi Setya Budi/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
4 7	Studi Geologi Daerah Gunung Malintang dan Sekitarnya di	Kabupaten Lima Puluh	2018		√	Dian Al Muthian/ Dinas Penanaman				

	Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	Kota				Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
4 8	Observasi dan Penyelidikan Tanah Dalam Rangka Persiapan Perencanaan Jalan Tol Padang - Pekanbaru	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	Ir. Daz Edwiza, MT/ Universitas Andalas				
4 9	Studi Daerah Tangkapan Air (DTA) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018		√	Indang Dewata/ Universitas Negeri Padang				

NO	BIDANG/JUDUL INOVASI DAERAH DAN INOVASI DI DAERAH	LOKASI	TAHUN	SUMBER DANA			NAMA INOVATOR	DESKRIPSI INOVASI	PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN		
				APBN/APBD	MANDIRI	PENYANDANG DANA			SUDAH	BELUM	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>INOVASI DAERAH</b>										
1 1	Kelok Sambilan	Kabupaten Lima Puluh Kota	2017	√			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Motivasi mengembangkan inovasi "KELOK SAMBILAN" (Kami Berikan Layanan nan Elok untuk Mewujudkan Sisten Administrasi Kependudukan yang Tertib, Inovatif, dan Langsung sampai ke Nagari) melalui Pelayanan Langsung sampai ke Nagari berupa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, Surat Pindah/ Datang, Akta Kelahiran, Perekaman KTP elektronik dan Pelayanan Isbat Nikah Terpadu. Pelayanan langsung dilakukan ke semua Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 Nagari. Masyarakat dengan adanya pelayanan langsung sampai	√		

							ke Nagari sangat membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus dokumen sehingga sangat meringankan beban masyarakat baik dari segi biaya, waktu dan tenaga.			
1 2	SMS Gate Way	Kabupaten Lima Puluh Kota	2017	√		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Merupakan kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini Bidan Desa/ Nagari melalui program "SMS Gate Way" dengan Nomor +62811668660 dimana setiap pertolongan kelahiran bidan setempat akan memasukkan data kelahiran langsung ke nomor tersebut, sehingga akan langsung merubah data populasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	√		
1 3	Itsbat Nikah Terpadu	Kabupaten Lima Puluh Kota	2017	√		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Merupakan pelayanan administrasi kependudukan yang bekerjasama dengan tiga (3) lembaga yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadilan Agama Kab/ Kota;</li> <li>2. Dinas Kependudukan dan</li> </ol>			

							<p>Catatan Sipil;</p> <p>3. Kementerian Agama (KUA) Kabupaten Lima Puluh Kota</p> <p>Dalam bentuk Itsbat Nikah Terpadu. Hal ini membantu masyarakat yang belum memiliki buku nikah untuk diterbitkan buku nikahnya dan masyarakat yang belum tertib administrasi kependudukannya/ dokumen kependudukan.</p>			
1 4	Pelayanan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	2017	√		Badan Keuangan	<p>Kegiatan ini dilaksanakan dengan dilatar belakangi oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.</li> <li>2. Adanya kepastian proses, biaya dan waktu penyelesaian.</li> <li>3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.</li> </ol> <p>Sehingga hal ini akan berdampak pada terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.</p>			
1 5	Pol PP Pariwisata	Kabupaten Lima Puluh Kota	2018	√		Satuan Polisi Pamong Praja	<p>Pengembangan Pariwisata yang sadar wisata dibutuhkan penguatan indikator pengamanan lokasi wisata yang nyaman</p>			

							dan tertib. Tujuan inovasi ini agar terciptanya keamanan wisatawan dalam menikmati objek wisata dengan terhindar dari gangguan trantib. Dengan adanya pol PP Pariwisata ini diharapkan akan meningkatnya keamanan dan kenyamanan di obejk-objek wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.			
<b>2</b>	<b>INOVASI DI DAERAH</b>									
2 1	Alat Otomatis Sederhana Tempat Minum Unggas di Kandang Postal (Pembesaran Bibit)	Nagari Taeh Baruah Kec. Payakumbuh	2018	√		Endri. Z		√		Juara I Lomba TTG Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
2 2	Rancang Bangun Otomatis Mesin Pemberi Makan Ayam	Politeknik Pertanian Payakumbuh	2018	√		Agil			√	
2 3	Alat Pelobang Jagung	Kec. Payakumbuh	2018	√		Barry Prima Putra		√		
2 4	Alat Peningkatan Pembudidayaan Ikan Dengan Alat Pompa	Politeknik Pertanian Payakumbuh	2018	√		Junaidi				

		Sederhana Micro Buble Water							
2	5	"Alpaka Portable" Alat Panjat Kelapa	Politeknik Pertanian Payakumbuh	2018	√		Rully Syahta		
2	6	Impelentasi Internet of Thing (IOT) pada Penyiraman dan Pemupukan Tanaman Secara Otomatis Berbasis Listrik Tenaga Surya	Politeknik Pertanian Payakumbuh	2018	√		Nurmaini		Juara II Lomba TTG Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
2	7	Alat Perangkap Hama Serangga Padi Sawah Menggunakan Cahaya Tenaga Surya	Politeknik Pertanian Payakumbuh	2018	√		Hari Andi Ilham		Juara III Lomba TTG Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
2	8	Donat Jagung Manis	Politeknik Pertanian Payakumbuh	2018	√		Miki Zainatun Syakdiah		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah profil kelitbangan yang kami buat ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan menjadi acuan para pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan untuk kemajuan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti, dan lugas karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Selain itu, saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan profil kelitbangan ini di masa yang akan datang. Sekian penutup dari kami semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.